

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan sesuai untuk budidaya pertanian. Sektor pertanian juga memegang peranan sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Peranan sektor pertanian juga dapat dilihat secara komprehensif antara lain: (1) sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*foodsecurity*), (2) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri, (3) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor lain (Hendrawan, *et al*; 2011: 86).

Satu hal yang perlu diingat juga dimana pertambahan jumlah penduduk juga menambah kebutuhan akan pemukiman. Akibatnya terjadi perebutan penggunaan lahan untuk produksi pangan dan pemukiman. Sehingga, ketersediaan lahan untuk produksi pangan semakin sempit. Bahkan dengan lahan pertanian yang tersisa, masih terdapat kesenjangan antara potensi hasil dengan hasil dilapangan. Penyebab kesenjangan tersebut antara lain, (1) penggunaan benih unggul varietas potensi tinggi masih rendah yaitu sekitar 53 %, (2) penggunaan pupuk yang belum berimbang dan efisien, (3) penggunaan pupuk organik belum populer dan (4) budidaya spesifik lokasi belum berkembang. Kesenjangan ini sangat terlihat pada produksi padi sawah out put yang dihasilkan masih dibawah potensial hasil dan cenderung menurun. Hasil produksi padi nasional ini tidak mampu mengimbangi kenaikan konsumsi beras nasional sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi beras perkapita (Suci, *et al*; 2014:1).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan adalah melalui penerapan teknologi budidaya secara

tepat dengan penggunaan sarana produksi. Oleh karenanya untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah ikut berperan dalam program pembangunan pertanian. Untuk ilustrasi peranan pemerintah, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang dapat memperlancar masuknya investasi kedaerahnya (seperti investasi dalam sektor pertanian), menciptakan birokrasi yang ringkas dan bahkan terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan prasarana di berbagai sektor. Salah satu contoh kebijakan pemerintah di tahun 2008 yang berhubungan dengan investasi sektor pertanian yaitu subsidi yang diberikan pada sarana produksi tani, terutama pupuk (Kasiyati, 2010:29).

Pupuk sebagai salah satu komponen penunjang pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan usahatani di Indonesia, hal ini karena petani telah menya dari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan, terutama mengenai usaha intensifikasi. Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus memproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu (Rini, 2006:1).

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan tentang jenis dan jumlah pupuk yang digunakan dalam kegiatan berusaha tani. Kedua faktor tersebut adalah faktor teknis-agronomis dan faktor sosial ekonomi. Faktor teknis-agronomis meliputi : (1) Jenis paket teknologi yang direkomendasikan, (2) Informasi teknologi dari sumber-sumber lain, (3) Kemungkinan substitusi atau komplemen tari tasantar jenis pupuk, (4) Pola tanam dalam setahun dan (5) Luas lahan yang diusahakan. Sementara faktor-faktor sosial

ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan jumlah dan jenis pupuk, seperti (1) Harga pupuk itu sendiri, (2) Harga pupuk yang lain, (3) Harga input yang lain, (4) Harga out put dan (5) Tingkat keuntungan usahatani (Darwis dan Saptana, 2010:169).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (2015:40) bahwa di Provinsi Gorontalo kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2016 untuk jenis pupuk Urea mencapai 19.600 ton, pupuk SP-36 1.400 ton, pupuk ZA 510 ton, pupuk NPK 18.570 ton dan pupuk Organik 790 ton. Sementara kebutuhan pupuk untuk tanaman pangan jenis pupuk Urea mencapai 3.335.350 ton, pupuk SP-36 635.375 ton, pupuk ZA 812.385 ton, pupuk NPK 2.018.580 ton dan untuk pupuk Organik 817.200 ton.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di Kota Gorontalo yang berjudul “Analisis Perilaku Petani Padi Sawah dalam Pemanfaatan Subsidi Pertanian di Kota Gorontalo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyaluran subsidi pertanian dari pemerintah kepada petani padi sawah di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana perilaku petani terhadap subsidi pertanian di Kota Gorontalo ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana model penyaluran subsidi pertanian dari pemerintah kepada petani padi sawah di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui perilaku petani terhadap subsidi pertanian di Kota Gorontalo.

D. Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, sebagai wahana menambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya analisis perilaku petani padi sawah dalam pemanfaatan

subsidi pertanian serta berkesempatan dapat menyajikan teori-teori yang berhubungan secara langsung di lapangan.

2. Bagi Pemerintah, sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup petani padi sawah di Provinsi Gorontalo.